

PROFIL INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI



MARET 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.



PROFIL INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI



1. Nama Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Bali

2. Alamat dan Kontak

Alamat : Jl. DI Panjaitan No.14 Niti Mandala Renon, Denpasar
Telepon : 0361-243931
Email : inspektorat@baliprov.go.id

3. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Inspektorat

a. Tugas Pokok :

Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Inspektorat Daerah Provinsi Bali memiliki visi menjadi Aparat Pengawas Intern yang profesional untuk menunjang terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan.
- d. Dari visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:
 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik
 - Mewujudkan Aparatur Pengawas yang profesional

4. Kebijakan Daerah

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada dasarnya sudah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun beberapa Payung Hukum yang telah ditetapkan oleh Inspektur Daerah Provinsi Bali untuk kegiatan tahun 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024 adalah:

- a. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Bali tentang Standar Pelayanan Publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Nomor 192 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2023;
- b. Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Kinerja Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Inspektorat Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023;
- c. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Nomor 186 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- d. Keputusan Inspektur Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 188 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- e. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 187 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- f. Pelaksanaan Rapat dan Forum Internal APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 194 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- g. Keputusan Inspektur tentang Jabatan Pengendali Teknis pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023;



- h. Keputusan Inspektur Provinsi Bali tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 201 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- i. Keputusan Inspektur Provinsi Bali tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 269 Tahun 2024, tanggal 5 Januari 2024;
- j. Keputusan Inspektur Provinsi Bali tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 198 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- k. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Bali tentang Penunjukan Petugas Pengelola Kearsipan di Irbanwil dan Sekretariat pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 267 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- l. Keputusan Inspektur Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 197 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- m. Keputusan Inspektur Provinsi Bali tentang tentang Penyetaraan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 191 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;
- n. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Bali tentang Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas/Oprasional Pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 15880 Tahun 2023, tanggal 5 Agustus 2023;
- o. Keputusan Inspektur Provinsi Bali tentang Tim Asesor Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 197 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024;

5. Kelembagaan

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah V;
 - h. Jabatan Fungsional; dan
 - i. pelaksana.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
3. Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
5. Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

*Bagan Struktur Organisasi tercantum pada **Lampiran I**



6. Kepegawaian Daerah

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebanyak:

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	6 orang
3	Pejabat Eselon IV	1 orang
4	Fungsional Pengawas Pemerintahan	25 orang
5	Fungsional Auditor	31 orang
6	Fungsional Khusus	3 orang
7	Pelaksana/Fungsional Umum	25 orang
8	Tenaga Honorer	- orang
9	Tenaga Harian	- orang
10	Tenaga Non PNS	45 orang
11		
Jumlah		137 orang

Pola pembinaan karir pegawai telah terlaksana melalui prosedur yang berlaku seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, disiplin pegawai, kesejahteraan, dan sebagainya sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan. Adapun rincian data pola pembinaan karir pegawai sampai dengan bulan Pebruari 2024 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Kenaikan gaji berkala	24 orang
2	Model C	92 orang
3	Kartu Pegawai	92 orang
4	KARIS/KARSU PNS	92 orang
5	Satya Lencana Karya Satya 10 tahun	- orang
6	Satya Lencana Karya Satya 20 tahun	1 orang
7	Satya Lencana Karya Satya 30 tahun	- orang
8	Kenaikan pangkat	- orang
9	Taspen	92 orang
10	Hukuman disiplin	- orang



7. Keuangan Daerah

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, berikut merupakan anggaran dan realisasi pelaksanaan kegiatan ditahun sebelumnya yang telah berjalan sesuai jenis belanja pada Dokumen **Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023** sebagai berikut :

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA DAERAH	43.271.815.993,00	34.098.259.053,00	78,80
BELANJA OPERASI	34.765.627.692,00	29.518.329.803,00	84,91
Belanja Pegawai	20.296.862.514,00	19.695.014.242,00	97,03
Belanja Barang dan Jasa	14.468.765.178,00	9.823.315.561,00	67,89
Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA MODAL	8.506.188.301,00	4.579.929.250,00	53,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.125.493.301,00	4.293.930.000,00	70,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.208.695.000,00	217.599.250,00	9,85
SURPLUS/(DEFISIT)	43.271.815.993,00	34.098.259.053,00	78,80

Sedangkan untuk pelaksanaan program kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan **Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2024 (per bulan Pebruari 2024)** diklasifikasikan sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
BELANJA DAERAH	36,023,268,248	4.442.525.435	12.33
BELANJA OPERASI	34,171,632,060	4.205.525.435	12.30
Belanja Pegawai	21,385,658,000	2.965.791.725	12.30
Belanja Barang dan Jasa	12,785,974,060	1.239.733.710	15.17
JUMLAH BELANJA OPERASI	34,171,632,060	4.205.525.435	12.30
BELANJA MODAL	1,851,636,188	237,000,000	16.67



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,421,216,188	237,000,000	16.67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392,420,000	-	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,000,000	-	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35,000,000	-	
JUMLAH BELANJA MODAL	1,851,636,188	237,000,000	16.67
JUMLAH BELANJA	36,023,268,248	4.442.525.435	12.33
SURPLUS/DEFISIT	(36,023,268,248)	(4.442.525.435)	12.33

8. Barang Daerah

- a. Anggaran pada Belanja Modal realisasi keuangan **pada tahun 2023** sebesar Rp. **8.506.188.301** atau sebesar **53,84** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.125.493.301,00	4.293.930.000,00	70,10
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.208.695.000,00	217.599.250,00	9,85
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.000.000,00	68.400.000,00	95,00
	Jumlah	8.506.188.301,00	4.579.929.250,00	53,84

- b. **Untuk tahun Anggaran 2024** pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat rincian belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.421.216.188	237.000.000	16.67
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.420.000	Belum Terealisasi	-



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000	Belum Terealisasi	-
4.	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000	Belum Terealisasi	-
	Jumlah	1,851,636,188		

9. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASI

Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah menyusun sasaran-sasaran yang tertuang dalam program kerja Semester II Tahun 2023.

Program kinerja pengawasan dan realisasinya pada Semester II Tahun 2023, baik yang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan seperti tabel 1 berikut :

a. Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester II Tahun 2022

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT			
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Audit								
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	3	Rp. 735.887.000,00	3	Rp. 735.887.000,00	-	-	-	-
2	Probity Audit	3	Rp. 313.199.640.540,00	3	Rp. 313.199.640.540,00	-	-	-	-
3	Audit Kinerja	4	Rp. 1.556.735.935.066,00	4	Rp. 1.787.418.351.127,00	-	-	-	-
B	Reviu								
1	Reviu LKPD	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Reviu RKPD	1	Rp. 5.948.536.105.078,00	1	Rp. 5.948.536.105.078,00	-	-	-	-
3	Reviu LPPD	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Reviu DAK	1	-	1	-	-	-	-	-
5	Reviu RKA	1	Rp. 5.041.197.053.961,00	1	Rp. 5.041.197.053.961,00	-	-	-	-
6	Reviu RKA Perubahan	1	Rp. 5.983.126.584.360,00	1	Rp. 5.983.126.584.360,00	-	-	-	-
7	Reviu KUA PPAS	1	Rp. 5.983.126.584.360,00	1	Rp. 5.983.126.584.360,00	-	-	-	-
8	Reviu KUA PPAS Perubahan	1	-	1	-	-	-	-	-



No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT			
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Reviu								
9	Reviu LKjIP	1	-	1	-	-	-	-	-
10	Reviu Renja	1	Rp5.983.126.584.360,00	1	Rp5.983.126.584.360,00	-	-	-	-
C	Evaluasi								
1	Maturitas SPIP	1	Rp. 245.203.051.335	1	Rp. 245.203.051.335	-	-	-	-
2	Evaluasi PPRG	3	-	3	-	-	-	-	-
3	Evaluasi ZI	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Adhyasta Prajaniti	1	-	1	-	-	-	-	-
5	Evaluasi RB	1	-	1	-	-	-	-	-
6	Evaluasi AKIP	1	-	1	-	-	-	-	-
7	Evaluasi SAKIP	1	-	1	-	-	-	-	-
D	Evaluasi								
1	Monev PBJ	1	Rp. 6.933.947.319.883,00	1	Rp. 2.745.859.008.288,59	-	-	-	-
2	Korsupgah	1	-	1	-	-	-	-	-
3	Monev Dana Desa	35	Rp. 35.000.000.000,00	35	Rp. 35.000.000.000,00	-	-	-	-
4	Percepatan Penurunan Stunting	1	-	1	-	-	-	-	-
5	Rencana Kerja PPG	1	-	1	-	-	-	-	-
6	Surevi Penilaian Integritas	1	-	1	-	-	-	-	-
7	Monev Dana Bos	19	Rp. 19.000.000	19	Rp. 19.000.000	-	-	-	-
8	Monev WBS BK	1	-	1	-	-	-	-	-

Keterangan:

- OP = Objek Pengawasan
- Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu



Dari hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2023 termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2023 telah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu RKPD, DAK, LPPD, LKjIP, RKA, RKA Perubahan, KUA PPAS, KUA PPAS Perubahan dan Reviu BMD Pemerintah Provinsi Bali.
2. Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali, dari 36 Perangkat Daerah yang di lakukan evaluasi hasilnya dapat di kemukakan bahwa 36 Perangkat Daerah mendapatkan nilai A (Memuaskan).
3. Laporan hasil evaluasi Semester II Tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI Pemerintah Provinsi Bali, kami mengusulkan : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 94,06, UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 92,93, UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 91,51, UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 89,73, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 88,85, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk predikat Menuju



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 88,45.

4. Pada Semester II Tahun 2023 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung.
5. Dari hasil penilaian 5 (lima) Perangkat Daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan ***Adhyasta Prajaniti*** Menuju Bali Era Baru Tahun 2023, antara lain : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali
6. Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 3 kegiatan Probity Audit antara lain Probity Audit pada Tahap Pelaksanaan pada Bulan April 2023 sampai dengan Progres Minggu ke-39 (tiga puluh sembilan) untuk Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Probit Audit Tahap Pelaksanaan sampai dengan Serah Terim Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD Untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan Berupa Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Layanan Kanker Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, Probity Audit Kegiatan Penyelenggara Jalan Provinsi Pengawasan Teknik Ruas Jalan Provinsi Ubud – Tegalalang – Bubungbayung.
7. Kegiatan yang juga dilakukan pada Semester II Tahun 2023 adalah monitoring Dana BOS pada Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung dan Karangasem pada 21 Sekolah dengan total anggaran yang diawasi sebesar ± Rp. 20.656.721.514,00
8. Inspektorat Daerah Provinsi Bali juga telah melakukan monitoring terhadap Dana Desa pada Semester II Tahun 2023 yaitu 59 desa di 5 Kabupaten (Tabanan,



Buleleng, Gianyar, Bangli, Klungkung) dengan total anggaran yang diawasi sebesar ± Rp. 59.000.000.000,00.

9. hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2023, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **99,93%**
10. Pada Semester II Tahun 2023, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 414 temuan dan 456 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 443 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti, 13 masih dalam proses dan tidak ada yang belum di tindaklanjuti.
11. Pada Semester II Tahun 2023, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 24 rekomendasi yang statusnya sudah sesuai/selesai dengan persentase **82,7%** dan terdapat 5 rekomendasi yang masih dalam proses.
12. Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Khusus nilai capaian **Pemerintah Provinsi Bali** sebesar **99,20%** dan menduduki **Peringkat I dari 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia**.
13. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2022 terdapat 1 (satu) pengaduan menyangkut saber pungli, 2 (dua) pengaduan menyangkut gratifikasi, dan 560 (lima ratus enam puluh) pengaduan menyangkut SP4N Laporan.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I WAYAN SUGIADA
NIP. 19651231 198603 1 175



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2024

A. IRBANWIL I

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024												
WILAYAH PENGAWASAN	TAHUN 2024											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Inspektur Pembantu Wilayah I	Pembinaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Pembinaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali	Pembinaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Pembinaan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	Pembinaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Audit Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Evaluasi PPRG pada Kab/Kota se Bali	Evaluasi PPRG pada Kab/Kota se Bali	Evaluasi PPRG pada Kab/Kota se Bali	Pembinaan pada Inspektorat Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati pada Pemerintah Kota Denpasar	Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Badung	Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan	Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	
	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Pengawasan Manajemen Risiko/SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Penghargaan Adhyasta Prajaniti pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Penghargaan Adhyasta Prajaniti pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Penghargaan Adhyasta Prajaniti pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Evaluasi pada Dinas Kesehatan			Audit Kinerja pada Dinas Perhubungan	
		Probit Audit	Penghargaan Adhyasta Prajaniti pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Penghargaan Adhyasta Prajaniti pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali								



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. IRBANWIL II

	PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024												
WILAYAH PENGAWASAN	TAHUN 2024												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Inspektur Pembantu Wilayah II	Pembinaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Pembinaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	Pembinaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Pembinaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	EKPPD pada Kab/Kota se Bali	EKPPD pada Kab/Kota se Bali	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi	Probity Audit	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi	
	Pembinaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi	Pembinaan pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	Pembinaan pada Biro Umum dan Protokol Provinsi Bali	EKPPD pada Kab/Kota se Bali	EKPPD pada Kab/Kota se Bali	Probity Audit	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi	Probity Audit	Probity Audit	Monitoring Penyerapan Anggaran dan PAPBU pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali	
	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi		Monitoring Penyerapan Anggaran dan PAPBU pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi	Probity Audit	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi	Probity Audit	Monitoring Penyerapan Anggaran dan PAPBU pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Probity Audit	Audit Kinerja pada Dinas Kebudayaan	Probity Audit	
			Reviu LPPD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Reviu LPPD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Probity Audit	Probity Audit	Monitoring Penyerapan Anggaran dan PAPBU pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Probity Audit	Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Karangasem	Probity Audit		Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kabupaten Jembrana	Probity Audit
			Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit		Probity Audit	Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Probity Audit	Audit Kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
			Probity Audit		Probity Audit			Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kabupaten Bangli	Money pada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



C. IRBANWIL III

	PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024												
WILAYAH PENGAWASAN	TAHUN 2024												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Inspektur Pembantu Wilayah III	Pembinaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	Pembinaan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali	Pembinaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	Reviu RKA pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Reviu RKA Perubahan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	
	Reviu Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Provinsi Bali	Probity Audit	Reviu RKPD pada Pemerintah Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit	
		Reviu Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Probity Audit		Probity Audit	Reviu KUA PPAS pada Pemerintah Provinsi Bali	Reviu Perubahan KUA PPAS pada Pemerintah Provinsi Bali	Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Jembrana	Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kabupaten Gianyar	Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem	Audit Kinerja pada Dinas Pariwisata	Audit Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Probity Audit				Reviu RKPD Perubahan pada Pemerintah Provinsi Bali	Reviu Renja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
						Probity Audit	Probity Audit						Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Bangli



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



D. IRBANWIL IV

	PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024											
WILAYAH PENGAWASAN	TAHUN 2024											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Inspektur Pembantu Wilayah IV	Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Pembinaan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	Pembinaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Bali	Money Dana Desa pada Kab/Kota se Bali	Probit Audit pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Bali
	Money Dana BOS pada SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Reviu LKIP pada Pemerintah Provinsi Bali	Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Bali	Money Dana BOS pada SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Pembinaan pada Biro Hukum Provinsi Bali	Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Bali	Pembinaan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	Probit Audit pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Probit Audit pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Probit Audit pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kabupaten Badung	Probit Audit pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
	Money Dana Desa pada Kab/Kota se Bali		Money Dana BOS pada SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Money Dana Desa pada Kab/Kota se Bali	Pembinaan pada Biro Organisasi Provinsi Bali	Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Tabanan	Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung	Pemeriksaan Urusan pada Pemerintah Kota Denpasar	Audit Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Money WBS dan Money BK pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali		Penegakan Tunas Integritas pada SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Penilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Penilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Penegakan Tunas Integritas pada SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Money Dana Desa pada Kab/Kota se Bali					Money WBS dan Money BK pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



E. IRBANWIL V

WILAYAH PENGAWASAN	PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024											
	TAHUN 2024											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Inspektur Pembantu Wilayah V	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit	Probity Audit
	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Monev Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Riksus/PD TT	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
	Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev SP4N-LAPORI pada Kab/Kota se Bali	Monev SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Riksus/PD TT	Monev Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali
		Monev SPI / PPG pada Kab/Kota se Bali	Penyusunan Renja SPI dan PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev SP4N-LAPORI pada Kab/Kota se Bali	Monev Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Monev SPI / PPG pada Kab/Kota se Bali	Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev SP4N-LAPORI pada Kab/Kota se Bali	Monev SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev SP4N-LAPORI pada Kab/Kota se Bali	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/SP4N-LAPORI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev SPI / PPG pada Kab/Kota se Bali
				Monev SPI / PPG pada Kab/Kota se Bali	Monev SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Pelaporan SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Monev SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev SPI / PPG pada Kab/Kota se Bali	Monev Saber Pungli pada Kab/Kota se Bali	Pelaporan SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
				Monev SPI / PPG pada Kab/Kota se Bali	Monev SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Tindak Lanjut SPI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Monev SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali				Monev SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	
				Monev SPI / PPG pada Kab/Kota se Bali	Monev SPI / PPG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali							
				Monev SPI / PPG pada Kab/Kota se Bali								



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Keterangan :

1. PKPT berbasis risiko (Permendagri 61 Tahun 2019 Pasal 2), dengan tahapan :
 - a. Tahapan penyusunan RR (Risk Register) oleh OPD
 - b. Evaluasi oleh Tim RR Inspektorat
 - c. Input dan kalkulasi data melalui SIMWASDA
 - d. Output yang dihasilkan adalah matrik PKPT berbasis risiko
2. Prinsip PKPT (implementasi binwas) :
 - a. Pembinaan dilaksanakan kepada semua OPD di lingkungan Pemprov Bali (dari Januari-Juni)
 - b. Pengawasan/Pemeriksaan/Audit dilaksanakan mulai bulan juli-desember
(Dalam upaya pencegahan/peringatan dini/PP 12 Tahun 2017 Pasal 16)
3. Sinkronisasi perencanaan APIP provinsi dengan kabupaten/kota :
 - a. Pemeriksaan Reguler ke kabupaten/kota dilaksanakan bulan September-November
 - b. Pemeriksaan urusan dilaksanakan November
(Undang-Undang 23 Tahun 2018 Pasal 378)

4. Keterangan Warna

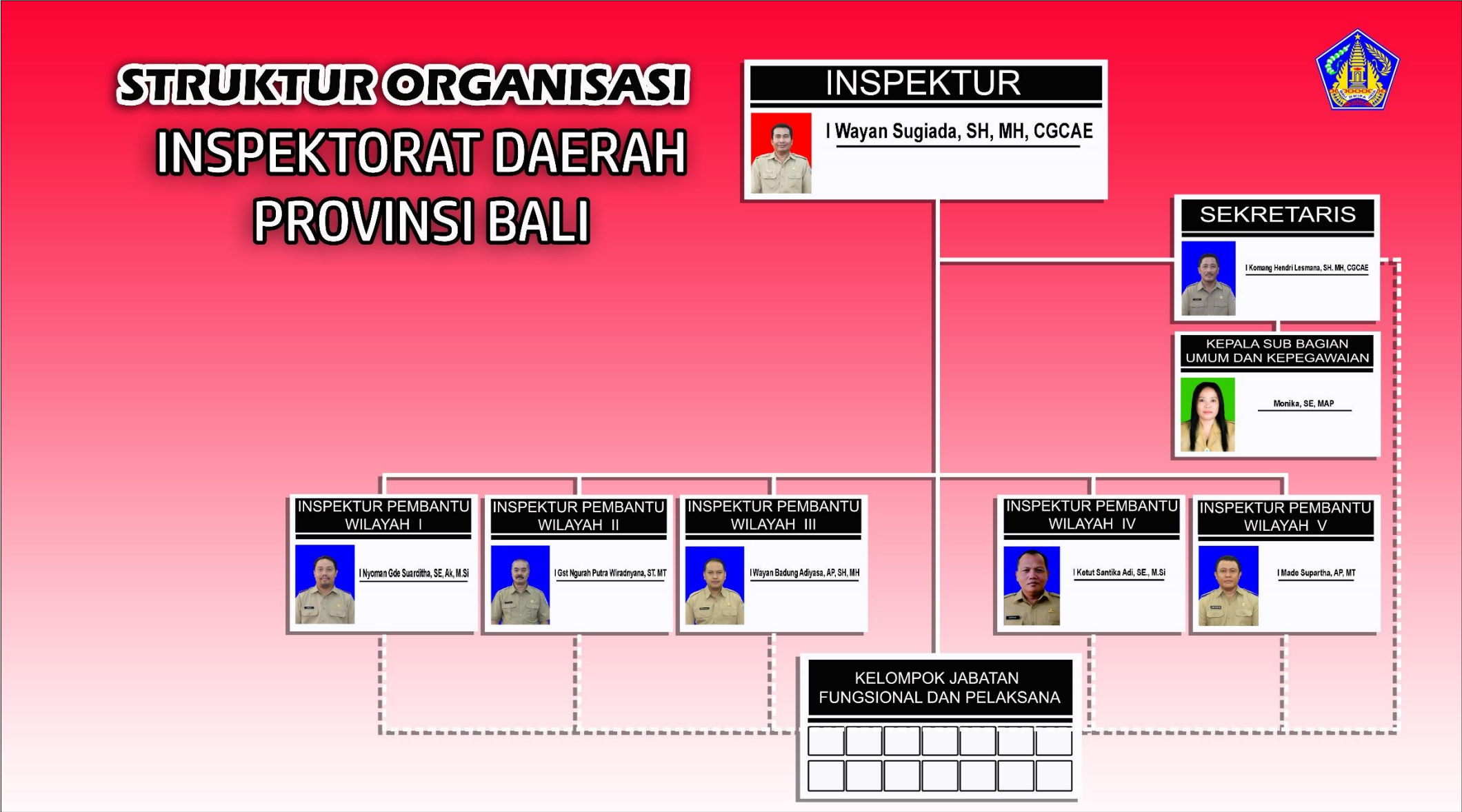
Biru Muda	Hijau Tua	Kuning	Ungu	Silver	Cokelat
Pembinaan OPD Pemprov	Mandatory	Probitiy	Pemeriksaan Urusan	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat / Saber Pungli	Riksus/PD TT
Merah	Pink	Orange	Abu Tua	Hijau Muda	Gold
Audit Kinerja	Pemeriksaan Reguler	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat / SP4N Lapor	Fasilitasi Laporan Hasil Monev Program Pengendalian Gratifikasi	Sosialisasi	Monev
Coklat Hijau	Abu Tua	Biru Tua			
Pelaporan	Tindak Lanjut	Penyusunan Renja SPI dan PPG			



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

